

UPAYA KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DENGAN DUNIA KERJA BIDANG BOGA

Sri Palupi

sripalupi@uny.ac.id

Jurusan PTBB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, dunia kerja dan masyarakat maupun budaya pada abad ke-21 ini menuntut dimilikinya kompetensi esensial bagi tenaga kerja yang relevan diberbagai tingkat dan kondisi pekerjaan, sehingga bangsa Indonesia dapat menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu mengatasi berbagai tantangan. Dari hasil pengamatan peneliti saat ini antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja masih kurang ada kerja sama. kemitraan antara perguruan tinggi boga dengan dunia kerja, masih di rasa kurang efektif dari sisi waktu, kurikulum, MOU maupun pelaksanaannya.

Ada tiga prinsip kemitraan yaitu: (1) saling menguntungkan, (1) saling memperkuat dan (3) saling memerlukan. Dimanapun suatu kerja sama tentu senantiasa akan diperhitungkan untung dan ruginya. Baik dari sisi pendidikan vokasi maupun dari sisi DUDI.

Pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan tamatannya mampu bekerja pada bidang tertentu. Diharapkan semakin erat kerjasama dengan dunia usaha, maka visi, misi, dan isi pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi khususnya bidang boga, juga akan semakin dekat dengan realitas dunia usaha. Dalam hal ini, kontribusi dunia usaha bidang boga terhadap pendidikan tinggi vokasi sangat penting artinya. Untuk itu, jika pendidikan tinggi vokasi ingin meningkatkan kualitas dan relevansi tamatannya dengan dunia usaha, maka kerjasama dengan dunia usaha bukan lagi hanya penting tetapi sudah merupakan keharusan.

Kata kunci: Kerjasama, Pendidikan Tinggi Vokasi, Dunia Kerja

PENDAHULUAN

Perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, dunia kerja dan masyarakat maupun budaya pada abad ke-21 ini menuntut dimilikinya kompetensi esensial bagi tenaga kerja yang relevan diberbagai tingkat dan kondisi pekerjaan, sehingga bangsa Indonesia dapat menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu mengatasi berbagai tantangan. Kualitas tenaga kerja tersebut harus memadai dalam berbagai hal seperti: kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam pekerjaannya. Hal ini terjadi karena tren bisnis dan industri yang dihasilkan dari perubahan pasar global dan teknologi mulai merambah ke dunia pendidikan, sehingga menuntut pentingnya penyiapan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu mengatasi berbagai tantangan jaman. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menyiapkan kompetensi peserta didik yang relevan sesuai permintaan pasar tenaga kerja. Konsekuensi dari kondisi tersebut, lembaga pendidikan dituntut untuk menyiapkan kompetensi plus seperti kemampuan multi disiplin atau mempunyai satu set kompetensi profesional yang disertai dengan kompetensi lain terutama kompetensi kepribadian yang tangguh.

Secara konseptual tenaga kerja tersebut dapat disiapkan oleh lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Tetapi kenyataannya antara dunia pendidikan dan dunia kerja terjadi suatu kesenjangan yang cukup jauh.

Tenaga kerja terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara. Dalam persaingan global, tenaga kerja terampil adalah faktor keunggulan menghadapi persaingan global (Djojonegoro, 2007). Jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja sehingga pengangguran semakin hari semakin meningkat. Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, 610 ribu dari total 7,17 juta pengangguran terbuka di Indonesia, adalah "pengangguran intelektual" atau dari kalangan lulusan universitas. Rincinya, kata Muhaimin, 190 ribu dari 610 ribu pengangguran intelektual itu adalah lulusan pendidikan diploma I/II/III. Sementara lulusan strata 1 universitas yang menganggur mencapai 420 ribu orang. *Tribunnews.com diakses tgl 27 Mei 2013 jam 22.00.*

Sebenarnya sekolah maupun perguruan tinggi telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kurikulum. Namun karena kurikulum yang digunakan SMK, maupun perguruan tinggi, pada asat pembuatannya tidak melibatkan praktisi dari industri terkait, sehingga mata pelajaran/matakuliah yang diberikan kurang dapat memenuhi tuntutan

Seminar Nasional 2015 "Pengembangan SDM Kreatif dan Inovatif untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Berdaya Saing Global"
Jurusan PTBB FT UNY, 25 Oktober 2015

industri. Disisi lain perkembangan industri boga berjalan sangat cepat karena berhubungan langsung dengan konsumen yang menuntut perubahan terus menerus. Menurut Rupert Maclean, David Wilson (2009),

In a study commissioned by the American Society for Training and Development (McLagan, 1989), it was found that the pressures for workplace productivity will intensify, and that the pace of change will continue to accelerate with organizations and industries looking beyond obvious efficiency gains to more systematic ways of being low-cost producers of high-quality products and services.

Yang artinya, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh American Society Pelatihan dan Pengembangan (McLagan, 1989), ditemukan bahwa tekanan untuk produktivitas kerja akan meningkat, dan bahwa laju perubahan akan terus, cepat dengan organisasi dan industri, mencari hal yang efisien yang jelas keuntungan dengan cara-cara yang lebih sistematis, dengan biaya produksi rendah namun menghasilkan produk-produk dan jasa berkualitas tinggi.

Wardiman (1994), mengidentifikasi bahwa permasalahan pendidikan kejuruan saat ini meliputi : **Pertama**, sikap dan perilaku pendidikan yang lama (kurikulum 1984) SMK, tidak mampu menghasilkan tamatan yang berkualitas siap pakai, dan programnyapun tidak disiapkan untuk itu. Disisi lain, masyarakat yang berkepentingan dengan tamatan SMK khususnya dunia usaha dan industri selalu mengharapkan dan menuntut agar SMK menghasilkan tamatan yang siap pakai. Dengan kenyataan ini sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya telah mematok adanya "kesenjangan (gap)" antara "supply" dan "demand" ketenagakerjaan. **Kedua**, dalam tatanan penyelenggaraan pendidikan kita pada SMK, sangat kuat tertanam pengertian: "pendidikan demi pendidikan" maksudnya seakan akan kita sudah puas apabila kita telah melaksanakan proses belajar mengajar sekolah sesuai program yang tercantum pada buku kurikulum, kemudian kita melakukan evaluasi, dan menerbitkan STTB, titik. **Ketiga**, kegiatan pendidikan kejuruan pada SMK yang hanya mengandalkan kegiatan praktek di bengkel sekolah, adalah suatu kelemahan yang sangat mendasar. Kita tahu, bahwa selengkap apapun peralatan yang dimiliki oleh sekolah, dan setinggi apapun keahlian yang dimiliki oleh gurunya, kegiatan praktek disekolah akan selalu bersifat tiruan atau simulasi. Kegiatan yang bersifat simulasi tidak akan pernah mampu menghasilkan keahlian yang berkualitas profesional. **Keempat**, kekurangan fasilitas praktek di SMK dan dana operasional kegiatan praktek, mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan praktik dengan baik.

Dari hasil pengamatan peneliti saat ini antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja masih kurang ada kerja sama. Kerjasama antara perguruan tinggi boga dengan dunia kerja, masih dirasa kurang efektif dari sisi waktu, kurikulum, MOU maupun pelaksanaannya. Mahasiswa mencari sendiri industri yang digunakan untuk PI, industri yang dipilih kadang masih skala rumah tangga, sehingga industri yang dipilih kurang dapat memberikan tambahan ilmu, pengalaman dan ketrampilan yang diharapkan.

Beberapa kelemahan yang dapat diamati sebagai hasil dari proses pembelajaran pengolahan makanan yang konvensional adalah: (1) perolehan pengetahuan tentang bahan, proses kerja yang kurang memadai, karena keterbatasan bahan, dan contoh, (2) ketrampilan kerja kurang memadai, karena pengajar umumnya berasal dari akademisi, (3) sikap dan disiplin kerja, khususnya yang menyangkut manajemen kerja, misalnya waktu yang terlalu lama untuk mengolah makanan, karena pembelajaran hanya bersifat simulasi. (Kokom Komariah, 2013: 3)

Untuk mengatasi kesenjangan antara pendidikan dengan tuntutan industri maka perlu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Agar kerja sama tersebut dapat terwujud, pendidikan kejuruan kita, dapat melakukan transisi dari "sistem sekolah" ke "system ganda."

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Pentingnya Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi ini terkandung makna kedua belah pihak perlu membuat kesepakatan tentang tujuan maupun kegiatan bersama. Kerjasama itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Disamping itu terkandung pula makna bahwa kerjasama akan menyebabkan saling ketergantungan antara pihak pertama dan pihak kedua dan hubungannya bersifat interaktif. Kerjasama akan membuat keterlibatan antara kedua belah pihak. Keterlibatan merupakan bentuk aktifitas seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan tertentu, baik berupa materi atau tenaga. Menurut Parker (1990), dikatakan bahwa keterlibatan dapat dipandang dari tiga aspek yaitu: pertama alasan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut guna memperoleh upah, uang dan sebagainya. Kedua, alasan tujuan pekerjaan. Ketiga, sikap terhadap pekerjaan yang berupa kecenderungan untuk melakukan indentifikasi diri terhadap pekerjaan ataupun kecenderungan untuk merenggangkan diri.

Menurut, John F. Thomson, 1973, 38. Salah satu karakteristik pendidikan vokasi adalah: *Effective occupational preparation is impossible if the school feels that its obligation ends when the student graduates. The school, therefore, must work with employers to build a bridge between school and work. Placing the student on a job and following up his successes and failures provides the best possible information to the school on its own strengths and weaknesses.*

Yang artinya adalah persiapan kerja yang efektif adalah mustahil jika sekolah merasa bahwa kewajibannya berakhir ketika siswa lulus. Oleh karena itu sekolah, harus bekerja sama dengan pengusaha untuk membangun jembatan antara sekolah dan bekerja. Menempatkan siswa pada pekerjaan dan menindaklanjuti keberhasilan dan kegagalannya memberikan informasi yang terbaik untuk sekolah pada kekuatan dan kelemahan sendiri. Sebagaimana diuraikan Rainer Ortleb, (1992: 59) dalam *vocational training in the dual system*, bahwa pendidikan vokasi tidak bisa terlepas dari industri.

The dual system of vocational training presupposes the joint responsibility and cooperation of all those involved: employers, employees, State and education authorities cooperate at all levels, bearing joint responsibility. Such cooperation is subject to legal regulations and has proved to be successful.

Yang artinya pelatihan vocational dual sistem mengandalkan tanggung jawab bersama dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat: pengusaha, karyawan, Negara dan otoritas pendidikan bekerja sama di semua tingkatan, yang mengemban tanggung jawab bersama. Kerja sama tersebut tunduk pada peraturan hukum dan telah terbukti berhasil.

Kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja perlu dilaksanakan untuk: *Pertama*, meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan dunia nkerja. Dengan kerjasama yang erat, kesenjangan antara program pendidikan tinggi vokasi dengan tuntutan industri dapat dikurangi, dan sekaligus peran pendidikan tinggi vokasi sebagai penghubung antara mahasiswa dengan dunia kerja atau industri dapat ditingkatkan. ***Kedua***, kerjasama dapat meningkatkan biaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Dengan kerjasama, pendidikan tinggi vokasi dapat mengirimkan mahasiswanya untuk praktek kerja lapangan, bisa mendapatkan donasi peralatan, bisa melakukan unit produksi dan sebagainya yang pada akhirnya dapat membantu biaya pendidikan tinggi vokasi. ***Ketiga***, dengan

kerjasama yang baik, pendidikan tinggi vokasi akan mampu mengikuti perkembangan mutakhir dunia usaha, khususnya mengenai peralatan sehingga apa yang diajarkan di kampus tidak ketinggalan dengan apa yang sebenarnya dipraktekkan di dunia usaha. **Keempat**, kerjasama akan membantu tercapainya tujuan pendidikan tinggi vokasi yaitu mempersiapkan lulusannya untuk bekerja. Dengan kerjasama yang erat banyak kondisi dunia usaha yang bisa dibawa ke kampus, sehingga hal ini akan sangat membantu sosialisasi dunia usaha. **Kelima**, kerjasama dapat membantu mempercepat transisi mahasiswa dari dunia kampus ke dunia kerja. mahasiswa, selain mempelajari bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, belajar menyesuaikan kerja, belajar betah di tempat kerja dan belajar mengembangkan karir. **Keenam**, kerjasama akan meningkatkan wawasan dan kemampuan dosen tentang apa yang harus diajarkan. Wawasan dosen akan semakin terbuka sehingga mereka lebih realistis dalam mengajar. Dosen juga akan mampu menghubungkan teori dan praktek di lapangan. **Ketujuh**, bagi dunia usaha, kerjasama dapat mendatangkan berupa keuntungan yaitu: (1) dunia usaha dapat memilih calon tenaga kerja yang bermutu; (2) kerjasama dengan pendidikan tinggi vokasi dalam bentuk praktek kerja industri (PKI) dapat menguntungkan dunia usaha, karena ada tambahan tenaga kerja; (3) dunia usaha dapat mengambil keuntungan dari dosen, terutama dari jasa konsultasi. Dosen mempunyai ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha baik dalam bentuk konsultasi maupun pelatihan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kerjasama

Jika kerjasama itu dikehendaki secara tertulis, maka hal-hal yang dibutuhkan dalam perjanjian kerjasama paling tidak mencakup : (1) tujuan kerjasama, (2) program kerjasama termasuk alternative-alternatif kerjasama, (3) tanggung jawab pembiayaan, (4) penanggung jawab dan pelaksana kerjasama (membentuk staf gabungan), (5) prosedur kerjasama, (6) hubungan administrasi, (7) penempatan, (8) pernyataan waktu kerjasama (kapan dan berapa lama), (9) hal-hal lain yang tentu saja bergantung pada sifat kerjasama.

Keuntungan pendidikan vokasi bekerja sama dengan DUDI sebagaimana diutarakan Surya Dharma dkk, (2013:193), bahwa ada tiga prinsip kemitraan yaitu: (1) saling menguntungkan, (2) saling memperkuat dan (3) saling memerlukan. Dimanapun suatu kerja sama tentu senantiasa akan diperhitungkan untung dan ruginya. Baik dari sisi pendidikan vokasi maupun dari sisi DUDI.

Seminar Nasional 2015 "Pengembangan SDM Kreatif dan Inovatif untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Berdaya Saing Global"
Jurusan PTBB FT UNY, 25 Oktober 2015

C. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri meliputi:

1. Praktek Industri

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri, maka kampus harus melaksanakan praktek industri. Diharapkan dengan melakukan praktek industri mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung/nyata di dunia industri. Penilaian hasil kerja praktek yang memberi angka 3, 5, 6 atau 7 di kampus, berbeda dengan penilaian hasil kerja "accepted" atau "rejected" di industri. Setelah mengikuti praktek industri mahasiswa benar-benar siap memasuki dunia kerja. Manfaat kerja sama industri tidak hanya sampai disitu, Menurut Pardjono dalam Delly (2013) bahwa peran DUDI bagi pendidikan vokasi dan kejuruan diantaranya:

1. Sebagai Tempat Praktek Peserta Didik

Banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan mesin untuk praktek dalam memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang ditentukan, menggunakan industri sebagai tempat praktek (*outsourcing*). Permasalahannya adalah pada saat ini jumlah industri tidak sebanding dengan jumlah peserta didik/mahasiswa yang memerlukannya sebagai tempat praktek ini. Sementara itu, masing-masing industri memiliki kapasitas yang terbatas untuk bisa menampung mahasiswa untuk praktek di industri tersebut.

2. Industri Sebagai Tempat Magang Kerja

Sistem Magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan masal di sekolah. Dalam sistem magang seorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang juga dapat membantu peserta didik memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

3. Industri Sebagai Tempat Belajar Manajemen Industri dan Wawasan Dunia Kerja

Selama ini, industri dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Peserta didik kadang-kadang melakukan pengamatan cara

kerja mesin dan produk yang dihasilkan dengan secara tidak langsung belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha, sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini juga bisa menambah wawasan peserta didik pada dunia wirausaha.

Sebagai pendidikan vokasi dan kejuruan, orientasi pendidikannya harus diarahkan pada kebutuhan dunia kerja atau dunia industri dengan pola pendekatan kemitraan yang berkesinambungan. Bukan menggunakan pola asumsi. Dengan menjalin kerjasama antara pendidikan tinggi vokasi dengan DUDI, maka sebahagian besar teori Prosser dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi paling nyata dari sejumlah teori Prosser tersebut di atas adalah dilaksanakannya Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Praktek Kerja Industri (PI).

4. Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah kegiatan evaluasi untuk mengukur kemampuan yang dihasilkan oleh program studi tertentu, sesuai dengan standar yang di tentukan oleh lapangan kerja/industri atau pemakai. Idealnya setelah melakukan PI maka mahasiswa diminta untuk melakukan uji kompetensi. Sebagai tim evaluasi diambilkan dari industri/ praktisi. Dengan uji kompetensi ini mahasiswa akan mendapat pengakuan dan sertifikat tentang keahlian tertentu.

5. Unit Produksi

Unit produksi adalah suatu usaha yang berfungsi untuk memproduksi barang atau layanan jasa dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di kampus yang bersangkutan. Di kampus PTBB Yogyakarta unit produksi dilakukan melalui pembelajaran Manajemen Usaha Boga (MUB), yang dilaksanakan dengan sistem blok. Sebagaimana tertuang dalam keputusan Mendikbud 0490/U/1992 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan unit produksi sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk: (1) memberi kesempatan kepada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan praktek yang berorientasi kepada pasar; (2) mendorong siswa dan guru dalam hal pengembangan wawasan ekonomi dan kewirausahaan; (3) memperoleh tambahan dana bagi penyelenggaraan pendidikan; (4) meningkatkan

pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah;
(5) meningkatkan kreatifitas siswa dan guru.

Kegiatan unit produksi akan berjalan dengan baik apabila terjalin hubungan baik antara sekolah dengan lingkungan dimana sekolah tersebut berada. Contoh: sekolah menerima pesanan dari instansi atau masyarakat.

D. Kendala Kerja Sama

Industri saat ini dan lebih-lebih saat yang akan datang, menghadapi persaingan yang semakin ketat karena masing-masing industri berlomba untuk memproduksi barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi dan menguntungkan. Dalam kondisi persaingan yang ketat maka industri akan cenderung memakai tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berproduksi, berkreasi, berinovasi karena tenaga kerja semacam ini mempunyai fleksibilitas yang tinggi yang dapat mengubah dan menyesuaikan produk sesuai dengan permintaan pasar.

Tuntutan industri seperti ini merupakan tantangan dunia pendidikan terutama institusi penyedia tenaga kerja namun pada kenyataan sistem pendidikan formal di Indonesia seperti yang disinyalir banyak pihak belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dunia industri, dengan kata lain masih terdapat kesenjangan antara keduanya dan hal ini disebabkan karena hubungan antara sistem pendidikan formal dengan sistem industri masih lemah. Kendala-kendala tersebut meliputi :

1. Masih terdapat *mispersepsi* bahwa pendidikan bukanlah tanggung jawab dunia usaha dan pendidikan tinggi vokasi bukanlah urusannya. Tidak disadari bahwa dunia usaha merupakan penadah utama dari lulusan pendidikan tinggi vokasi. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan kerja sama. Dunia industri masih melihat training itu sebagai "cost", belum melihat sebagai "investasi".
2. Belum terlaksanakannya standarisasi profesi dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.
3. Belum adanya pengawasan secara intensif dari pemerintah dan penghargaan bagi industri yang bersedia sebagai institusi pasangan dalam program kerja sama antara perguruan tinggi vokasi dengan industri.
4. Terbatasnya daya tampung dunia industri sebagai institusi pasangan terhadap keikutsertaan mahasiswa untuk melaksanakan program kerja sama antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri.

5. Sejarah hubungan dunia dengan pendidikan dinegara kita menunjukkan ketidak seimbangan. Perkembangan penyediaan tenaga kerja selalu jauh lebih besar dari perkembangan permintaannya, akibatnya dunia usaha merasa lebih berharga dan merasa lebih dibutuhkan. Hal ini bertolak belakang dengan sejarah negara-negara maju dimana dunia usaha lebih cepat berkembangnya dari pada pertumbuhan penduduk sehingga dunia usaha justru yang membutuhkan tamatan sekolah, bukan sebaliknya.
6. Budaya kampus berbeda dengan budaya dunia usaha. Budaya kampus adalah budaya organisasi non profit, sedangkan budaya dunia usaha adalah budaya profit. Perbedaan yang tajam ini sering menimbulkan cara pandang yang berbeda, sehingga kerjasama yang dirintis tidak jarang terjadi hanya sebentar saja.

E. Upaya- Upaya Mengatasi Kendala Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerja sama, keterlmbatan instruktur institusi pasangan sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Setelah kita melihat kendala-kendala di atas maka perlu diupayakan beberapa alternatif pemecahan sebagai berikut :

1. Perlu kesepakatan dan kesadaran bahwa kerja sama/MOU antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri merupakan salah satu model pendidikan dalam upaya peningkatan profesionalisasi sumber daya manusia.
2. Perlu adanya koordinasi antara Dekdikbud, Depnaker dan Deperindag secara terpadu untuk memasyarakatkan program kerjasama (dalam bentuk PSG). Yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun KEPMEN.
3. Dunia pendidikan melakukan pendekatan yang harmonis dengan dunia industri berdasarkan asas saling menguntungkan melalui beberapa kegiatan antara lain: (a) Dunia industri melakukan inventarisasi kasus/permasalahan industri sebagai suatu topik kajian bagi dunia pendidikan; (b) menambah wawasan dosen dengan memperbanyak kunjungan/orientasi kerja di industri; (c) pihak kampus menghadirkan praktisi dalam berbagai bidang sebagai dosen pembicara tamu; (d) memperbanyak institusi pasangan yang terlibat kerjasama; (e) dunia pendidikan dan dunia industri saling memberikan pertukaran informasi.
4. Meluruskan *mistpersepsi* industri, bahwa pendidikan juga merupakan tanggung jawab dari industri. Karena lulusan yang dihasilkan akan dimanfaatkan industri.
5. Pemerintah diharapkan lebih banyak terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kerjasama dan pemberian penghargaan bagi industri yang telah melaksanakan kerjasama dengan sekolah.

KESIMPULAN

Perguruan tinggi vokasi adalah perguruan tinggi yang mempersiapkan tamatannya mampu bekerja pada bidang tertentu. Diharapkan semakin erat kerjasama dengan dunia usaha, maka visi, misi, dan isi pendidikan tinggi vokasi juga akan semakin dekat dengan realitas dunia usaha. Dalam hal ini, kontribusi dunia usaha terhadap pendidikan tinggi vokasi sangat penting artinya. Untuk itu, jika pendidikan tinggi vokasi ingin meningkatkan kualitas dan relevansi tamatannya dengan duni usaha, maka kerjasama dengan dunia usaha bukan lagi hanya penting tetapi sudah merupakan keharusan.

REFERENSI

BPS. (2013). Cunningham, I. Dawes, G & Bennet, B. (2004). *The Handbook of Work Based Learning*. Burlington: Gower Publishing Company.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – (2004). *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003 – 2010 Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas. Buku Pendukung HELTS 2003-2010*.

Hasbullah.(2006). *Otonomi pendidikan kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

John F. Thompson, (1973). *Foundations of Vocational Education*, New Jerrsey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Yogyakarta (2014). *Panduan Penyusunan dan Penilaian Tesis dan Disertasi*. Edisi 2014. Yogyakarta: PPS UNY.

Kokom Komariah, (2013). *Pengembangan Model Pembelajaran Pengolahan Makanan Dalam konteks Work-Based Learning di Industri Boga Bagi Mahasiswa Program Diploma III*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.

Rainer Ortleb, (1992). *Vocational Training In The Dual System*. Bonn: The Federal Minister For Education and Science.

Tribunnews.com diakses tgl 27 Mei 2013 jam 22.00. <http://www.hss.de/homepage-e.shtml>

*Seminar Nasional 2015 “Pengembangan SDM Kreatif dan Inovatif untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Berdaya Saing Global”
Jurusan PTBB FT UNY, 25 Oktober 2015*

Kompas, 28 Juli (2007). Rupert Maclean. David N. Wilson. (2009). *International Hand Book of Education for the Changing World of Work*. Bridging Academic and Vocational Learning. Volume 1of 6. Bonn Germany: Springer Unevoc.

Surya Dharma dkk. (2013). *Tantangan Guru SMK ABAD 21*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud.

Wardiman Djojonegoro.(1994). *Pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

